

Kerangka Acuan
Simposium Pembangunan JiKTI
"Penelitian untuk Rekomendasi Kebijakan; Sebuah Karya Dari Timur"
Makassar, 31 Oktober - 1 November 2011

Latar Belakang

Dewasa ini Knowledge Sector (KS) atau sektor pengetahuan menjadi semakin penting untuk mendapatkan perhatian. Selama ini di Indonesia, sektor pengetahuan lebih banyak digeluti dan dikembangkan oleh lembaga-lembaga kajian dimasyarakat akademik dan para intelektual yang hasilnya lebih cenderung pada pengembangan ilmu pengetahuan saja dan sangat jarang yang menghasilkan satu hasil yang lebih implementatif terutama pada dukungan pada aspek kebijakan kebijakan.

Salah satu alasan penting untuk mendorong perkembangan sektor pengetahuan di Indonesia saat ini dan ke depan adalah penyelenggaraan desentralisasi dan pengembangan kapasitas otonomi daerah.

Penerapan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, berarti daerahpun diharapkan dapat merumuskan sendiri kebijakan pembangunannya. Kebijakan yang berskala nasional tidak bisa secara otomatis bisa memenuhi kepentingan dan perkembangan daerah di tanah air yang memiliki skala dan dimensi permasalahan yang bervariasi. Disisi lain, justru melalui pengembangan kapasitas otonomi daerah diharapkan permasalahan daerah bisa diangkat kepermukaan yang bila diperlukan bisa mendapat dukungan kebijakan nasional.

Dalam kaitan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut, pihak pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dan melakukan kolaborasi dengan peneliti ataupun akademisi dan intelektual yang ada di daerah. Pada intinya, setiap daerah otonom juga sudah dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan pembangunannya yang valid dan bisa dipertanggung-jawabkan.

Penelitian tentang Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebenarnya telah banyak dilakukan namun hasil dari penelitian-penelitian tersebut tidak secara maksimal berkontribusi pada perumusan kebijakan pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada bagaimana perkembangan KTI bila dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Dari sisi sumber daya alam, KTI memiliki potensi yang sangat melimpah meski belum termanfaatkan secara maksimal dalam arti masih adanya kesenjangan antara perkembangan di KTI dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Menurut Bappenas (2009) hal ini bisa terlihat pada beberapa indikator antara lain: IPM: KTI 68,9 dan KBI 71,93, Ekspor-Impor (terhadap total nasional): KTI 40,22% dan KBI 59,78%, PMDN (terhadap total nasional): KTI 15,02% sementara KBI 84,98%, PMA (terhadap total nasional): KTI 3,73% versus KBI 96,27%.

Lemahnya interaksi ekonomi antar daerah di KTI oleh Bappenas adalah salah satu alasan kemunduran KTI. Untuk itu KTI seharusnya memiliki networking disemua aspek pembangunan agar kolaborasi yang terjadi dapat mengakselerasi proses pembangunan.

Berdasar pada fenomena diatas, kolaborasi studi atau kajian yang lebih terstruktur dan terprogram secara baik di KTI adalah hal yang perlu diadakan untuk mendukung akselerasi pembangunan KTI.

Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI) beranggotakan peneliti-peneliti berlatar belakang berbagai keilmuan dan memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan daerah. JiKTI memiliki

peran penting dalam rangka menghasilkan suatu kajian komprehensif mengenai KTI yang mampu berkontribusi pada rumusan kebijakan pembangunan di tingkat daerah, regional maupun juga tingkat nasional.

Kekuatan JiKTI adalah sebagai pionir institusi sektor pengetahuan di tingkat regional KTI yang mengandalkan jaringan dan kedua sebagai institusi yang induk kelembagaannya adalah Forum KTI yang juga menginisiasi terbentuknya Forum Kepala Bappeda. yang beranggotakan 12 Kepala BAPPEDA Provinsi dari kawasan Timur Indonesia. Kedua hal tersebut diatas adalah kekuatan yang dimiliki oleh JiKTI yang mendapatkan dukungan penuh untuk melakukan kolaborasi dengan pihak pemerintah daerah.

Dukungan dari pemerintah tentu saja dibutuhkan terutama untuk memanfaatkan hasil studi dan kajian sebagai bagian terpenting dalam formulasi kebijakan pembangunannya. Seperti kita ketahui, salah satu bentuk akuntabilitas publik dari satu kebijakan adalah kebijakan tersebut memiliki landasan pengetahuan yang kuat, yaitu yang lahir dari satu studi dan kajian yang valid. Di era demokrasi saat ini, dimana debat publik terhadap kebijakan pemerintah bukan lagi barang mewah, kebijakan yang tidak akuntabel di mata publik akan berdampak pada legitimasi pemerintah.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pembangunan di Kawasan Timur Indonesia dan untuk menghimpun hasil-hasil penelitian yang dapat mendukung efektifitas pembangunan di Kawasan Timur Indonesia maka Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI) akan melaksanakan Simposium Pembangunan yang bertema **“Penelitian untuk Rekomendasi Kebijakan; Sebuah Karya dari Timur”**

Tujuan

1. Mempresentasikan dan membahas hasil penelitian berikut rekomendasi kebijakan oleh peneliti JiKTI dan peneliti lainnya di Kawasan Timur Indonesia
2. Menjaring berbagai penelitian yang dapat berkontribusi bagi pembangunan
3. Mendorong pendayagunaan hasil penelitian sebagai basis dari kebijakan pembangunan
4. Mendayagunakan organisasi Jaringan Peneliti di Kawasan Timur Indonesia
5. Sebagai media bertukar pengetahuan dan pengalaman di antara para Peneliti di Kawasan Timur Indonesia dan Pemerintah Daerah.

Keluaran yang diharapkan

1. Hasil penelitian untuk rekomendasi kebijakan oleh JiKTI dan para peneliti lainnya di KTI didiseminasikan kepada para *stakeholder* pembangunan.
2. Berbagai penelitian yang berkontribusi terhadap pembangunan dapat terjaring, terutama penelitian-penelitian sektor kebijakan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah mendapatkan informasi tentang hasil penelitian yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan pembangunan yang dihadapi di masing-masing daerah.
4. Stakeholder pembangunan, khususnya di KTI, dapat mendayagunakan kehadiran organisasi yang berkarakter jaringan peneliti untuk mendorong efektifitas pembangunan
5. Terjadinya pertukaran pengetahuan, gagasan, dan pengalaman di antara para Peneliti di Kawasan Timur Indonesia dan Pemerintah Daerah.

Waktu Pelaksanaan

Simposium pembangunan ini akan dilaksanakan pada:

- Hari/Tanggal : Senin-Selasa/31 Oktober - 1 November 2011
Waktu : 08.30 – 17.00 WITA
Tempat : Hotel Grand Clarion Makassar, Sulawesi Selatan

Format Kegiatan

1. Simposium Pembangunan dilaksanakan selama 2 hari dengan masing masing 2 sesi diskusi (total 4 sesi/tema diskusi) dan pameran poster hasil penelitian akan dilaksanakan selama kegiatan simposium berlangsung.
2. Kegiatan simposium ini adalah untuk mempresentasikan hasil-hasil penelitian yang telah dibuat menjadi Kertas Kebijakan (*Policy Paper*) oleh anggota Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI) di 5 provinsi yaitu Maluku, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Setiap policy paper dari tiap provinsi adalah tentang masalah pembangunan yang dihadapi saat ini.
3. Policy paper akan dipresentasikan pada setiap sesi, dimana 3 topik lain yang berhubungan dengan tema pada policy paper juga akan dipresentasikan oleh 3 panelis. Ketiga panelis adalah terdiri atas akademisi dan pengambil kebijakan (pemerintah) yang berasal dari daerah yang berbeda agar pertukaran informasi dan pengalaman antar daerah dapat terjadi.
4. Simposium ini adalah sebagai media bertukar informasi, pengalaman dan pengetahuan bagi seluruh stakeholder pembangunan yang ada di KTI. Selain itu juga diharapkan pada simposium pembangunan ini sebagai basis hubungan yang lebih kuat antara para peneliti dengan pengambil kebijakan.
5. Selain presentasi dalam bentuk diskusi, kegiatan ini juga memberikan tempat bagi para peneliti lain untuk mempresentasikan hasil penelitiannya dalam bentuk poster. Poster tersebut akan dipajang pada tempat kegiatan selama kegiatan simposium berlangsung. Poster yang akan dipamerkan akan diseleksi oleh team BaKTI bersama Focal Point.

Peserta

Peserta pada kegiatan ini adalah seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang ada. Jumlah peserta yang diharapkan hadir adalah sebanyak 150 orang, yang terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
2. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)
3. Gubernur dari 12 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia
4. Bupati / Walikota dari beberapa daerah di Kawasan Timur Indonesia
5. BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Mitra Pembangunan Internasional
 - The Asia Foundation
 - CIDA
 - AUSAID
 - USAID
 - JICA
7. Peneliti dari Universitas, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Lembaga Penelitian
8. Organisasi Masyarakat Sipil
9. Focal Point dan Anggota JiKTI
10. Media Cetak Lokal